

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah mampu mengelola maupun menyelenggarakan sendiri kegiatan pemerintahan sesuai dengan azas kedaulatan serta penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom mengelola maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang tersebut terlihat penyelenggaran otonomi daerah saat ini memiliki regulasi yang kokoh. Dikala otonomi sekarang ini, pemerintah daerah diberi kekuasaan penuh guna merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan agar kebutuhan otonomi daerah tercukupi ataupun memesatkan terwujudnya kesejahteraan warga daerahnya. Sektor ekonomi merupakan satu dari beberapa sektor yang dipertimbangkan dalam pembangunan nasional Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor ekonomi yang berpotensi mendorong perekonomian Indonesia, karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nasional. Menurut data kementerian Koperasi tahun 2018, menunjukkan bahwa partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional adalah 61,1%. dari PDB. Daya serap tenaga UMKM adalah sebesar 97% dari tenaga kerja Indonesia atau sebesar 117 juta pekerja, sementara jumlah pelaku UMKM di Indonesia adalah 64,2 juta unit yang merupakan 99,99% dari total usaha di Inonesia.

Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat perekonomian Jawa Tengah. Kota Semarang berada di jalur lalu lintas ekonomi internasional maupun nasional karena letak geostrategi yang baik. Hasil positif mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, semula 2018 sebesar 6,52 % namun pada tahun 2019 menjadi 6,86 %. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peran menyalurkan pengusaha kecil dan menengah. Bersumber pada data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Perkembangan UMKM Kota Semarang dari Tahun 2017 – 2020

No	Perkembangan UMKM	
	Tahun	Jumlah (Unit)
1.	2017	11.054
2.	2018	14.893
3.	2019	17.057
4.	2020	17.575

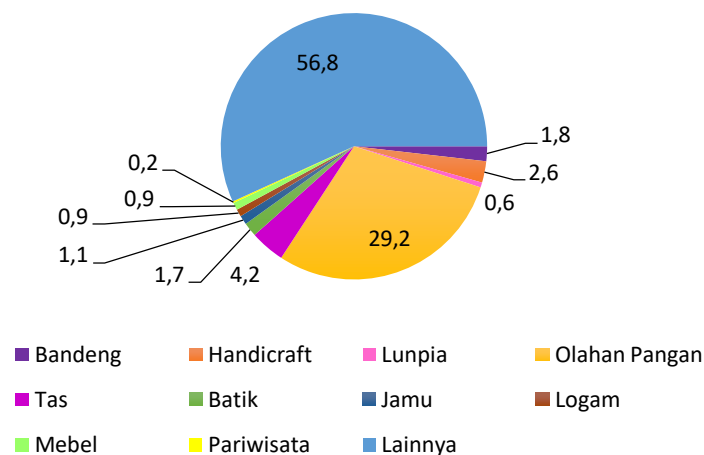
Sumber : Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Pada tabel 1.1. yang bersumber dari data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bahwa perkembangan UMKM Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang semula pada tahun 2017 berjumlah 11.054 unit bertambah pada tahun 2018 menjadi 14.893 unit UMKM yang ada di Kota

Semarang. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2.164 unit dari tahun sebelumnya menjadi 17.057 unit UMKM, dan mengalami peningkatan sebanyak 518 unit pada tahun 2020 sehingga total UMKM pada tahun 2020 sebanyak 17.575 unit.

Dari banyaknya jumlah UMKM di Kota Semarang terbagi dalam beberapa jenis. Berikut data jenis UMKM di Kota Semarang :

Diagram 1.1 Jenis UMKM di Kota Semarang Pada Tahun 2020



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2020 bahwa klasifikasi UMKM yang tersebar di Kota Semarang terdiri dari beberapa jenis yaitu usaha bandeng, handicraft, lunpia, olahan pangan, tas, batik, jamu, logam, mebel, pariwisata dan lainnya. Dengan masing-masing prosentase perjenisannya yaitu bandeng sebesar 1,8%, jamu sebesar 1,1%, handicraft sebesar 29,2%, logam sebesar 0,9%, lunpia sebesar 0,6 %, mebel sebesar 0,9%, olahan

pangan sebesar 2,6%, pariwisata sebesar 0,2%, tas sebesar 4,2%, batik sebesar 1,7%, dan jenis lainnya yaitu sebesar 56,8%.

Pada awal tahun 2020 sebuah wabah virus Covid-19 menyerang negara Indonesia. Masuknya virus Covid-19 pada negara ini sangat mempengaruhi maupun menimbulkan dampak pada segala sektor dalam tatanan hidup masyarakat. Beberapa sektor yang terdampak dengan adanya virus tersebut yaitu seperti sektor transportasi, sektor pendidikan, sektor kesehatan maupun sektor perekonomian. Demi mencegah dan mengurangi lonjakan kasus penularan Covid-19, maka pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di berbagai daerah dengan membatasi ruang gerak masyarakat saat di luar rumah. Kebijakan tersebut dinilai cukup efektif untuk menurunkan penyebaran penularan virus Covid-19, tetapi dengan adanya kebijakan tersebut sangat berdampak pada kelangsungan hidup pelaku UMKM. Sejatinnya UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian yang menjadi penggerak roda perekonomian bangsa Indonesia. Namun, dengan adanya pandemi ini membuat tidak sedikit UMKM yang terkena dampaknya, sehingga UMKM perlu mendapatkan perlakuan khusus agar UMKM mampu bertahan pada kondisi saat ini. UMKM menjadi sektor yang terdampak krisis serta mengalami pelemahan. Kondisi ini terjadi pada berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali Kota Semarang. Berikut ini merupakan data perkembangan omzet UMKM Kota Semarang dari tahun 2017 – 2020 :

Tabel 1.2**Perkembangan Omzet UMKM Kota Semarang Tahun 2017 – 2020**

No	Tahun	Omzet
1.	2017	1.025.227.440.746
2.	2018	1.435.111.276.173
3.	2019	1.781.656.887.231
4.	2020	1.567.935.213.457

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya omzet UMKM di Kota Semarang mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan omzet yang semua pada tahun 2019 omzet UMKM sebesar 1.781.656.887.231 sehingga mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.567.935.213.457.

Menurunnya omzet UMKM yang ada di Kota Semarang akibat adanya pandemi ini menyebabkan UMKM mengalami beberapa permasalahan. Terdapat beberapa UMKM di berbagai kecamatan yang ada di Kota Semarang yang terdampak karena adanya pandemi. Berikut ini merupakan data perbandingan jumlah UMKM dengan banyaknya UMKM yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang :

Tabel 1.3

Jumlah UMKM Terdampak Covid-19 Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Total UMKM (Unit)	Jumlah UMKM Terdampak Covid-19 (Unit)
1.	Genuk	919	84
2.	Semarang Timur	1060	78
3.	Semarang Tengah	1308	29
4.	Semarang Barat	1424	126
5.	Semarang Utara	1682	240
6.	Semarang Selatan	1011	62
7.	Tugu	432	24
8.	Gayamsari	1108	97
9.	Ngaliyan	656	44
10.	Pedurungan	2815	162
11.	Mijen	570	73
12.	Gunungpati	585	49
13.	Gajahmungkur	618	47
14.	Candisari	694	152
15.	Banyumanik	994	108
16.	Tembalang	1699	216
Jumlah		17.575	1.591

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat 17.575 unit UMKM di Kota Semarang yang tersebar pada berbagai kecamatan yang ada di Kota Semarang. Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah UMKM paling banyak se-Kota Semarang dengan jumlah UMKM sebanyak 2815 unit dan Kecamatan Tugu

menjadi kecamatan yang jumlah UMKM nya paling sedikit se-Kota Semarang dengan jumlah UMKM hanya 432 unit. Namun, dengan adanya wabah Covid-19 terdapat 1591 unit UMKM di Kota Semarang yang terdampak. Kecamatan Semarang Utara menjadi kecamatan yang jumlah UMKM terdampak Covid-19 paling banyak di Kota Semarang yaitu sebanyak 240 unit, sedangkan jumlah UMKM terdampak Covid-19 paling sedikit di Kota Semarang yaitu pada Kecamatan Tugu.

Menurut catatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bahwa terdapat kurang lebih 1591 pelaku UMKM di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini terkena dampak pandemi Covid-19 dengan berbagai macam tingkatan atau permasalahan yang dialami. Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM yaitu mengenai pemasaran (Hafsah, 2004). Sangat disayangkan, selama pandemi Covid-19 ini membuat beberapa UMKM terdampak dan mengalami kerugian, bahkan ada pelaku UMKM yang usahanya tidak beroperasi sama sekali. Permasalahan yang dihadapi entitas dari sektor UMKM tersebut yaitu kelangkaan bahan baku untuk produksi, keterbatasan kesediaan sumber dana untuk pengembangan usaha, kesulitan memperluas pemasaran, serta kondisi ekonomi yang buruk. Dalam masa pandemi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selaku instansi yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup UMKM di Kota Semarang melakukan survei kepada UMKM yang ada di Kota Semarang melalui kuesioner online. Dimana hasil dari survei tersebut yaitu adanya beberapa permasalahan yang dialami UMKM selama adanya pandemi ini, hal tersebut akan diperjelas pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Tingkat Permasalahan UMKM Terkena Dampak Covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020

No.	Jenis Permasalahan	Persentase (%)
1.	Permasalahan Permodalan	30,7 %
2.	Persmasalahan Produksi	5,6 %
3.	Persmasalahan Pemasaran	48,3 %
4.	Persmasalahan Lainnya	15 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan data pada tabel 1.4 bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 yaitu persoalan permodalan sebesar 30,7%, persoalan produksi sebesar 5,6%, persoalan pemasaran sebesar 48,3%, dan persoalan lainnya sebesar 15%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam memperluas pemasaran. Perlu adanya beberapa strategi yang tepat guna mengatasi beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM agar perkembangan UMKM di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik dan cepat. Pengembangan UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan daerahnya karena kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah maupun nasional cukup baik. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan UMKM, serta kemitraan. Dalam pengembangan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran memfasilitasi pengembangan usaha dalam berbagai bidang

seperti pemasaran, pengolahan dan produksi, desain dan teknologi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan UMKM dinilai berpotensi cukup besar dalam menggerakkan kegiatan masyarakat serta menjadi tumpuan sumber pendapatan oleh masyarakat itu sendiri.

Selama pandemi Covid-19, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melakukan beberapa upaya untuk keberlangsungan hidup UMKM seperti dengan mengadakan kegiatan pelatihan desain kemasan produk UMKM serta memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mendesain kemasan produknya. Selain dengan mengadakan kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga memberikan bantuan permodalan untuk membantu UMKM. Namun, dengan adanya kebijakan PPKM memberikan dampak yang cukup signifikan seperti adanya permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang guna memecahkan permasalahan yang dialami oleh UMKM selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan “Bagaimana pemasaran dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang dapat meningkat?”. Berangkat dari pertanyaan penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui beberapa uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka masalah – masalah berikut dapat ditemukan :

1. Sebanyak 1591 pelaku UMKM di Kota Semarang terdampak pandemi Covid-19.
2. Sebesar 48,3% dari jumlah UMKM terdampak mengalami permasalahan pemasaran.
3. Penurunan omzet UMKM Kota Semarang pada tahun 2020.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ?
2. Apa saja faktor pendukung dalam strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan rumusan masalahnya antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskandan menganalisis faktor pendukung dalam strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberi kegunaan :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bukti empiris dari penelitian sebelumnya serta dapat menambah ilmu maupun wawasan bagi perkembangan Ilmu Manajemen Publik dalam perumusan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pengembangan UMKM Kota Semarang.

b. Kegunaan Praktis

1) Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini mampu memperluas wawasan maupun pengetahuan tentang perumusan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang.

2) Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang sebagai bahan masukan ataupun evaluasi.

3) Pembaca

Penelitian yang dilakukan ini mampu memperluas pengetahuan dan informasi tertulis, serta menjadi referensi mengenai bagaimana Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam mengembangkan UMKM.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5.

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dian Andhiny Paramasari (Skripsi, 2009)	Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan sektor UMKM	Deskriptif Kualitatif	Pengembangan UMKM diharapkan menjadi penopang fundamental bagi pembangunan ekonomi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta menerapkan beberapa strategi. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya merupakan strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Pusat. Namun, tidak semua kebijakan saat ini diadopsi di tingkat kota karena harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan keterbatasan anggaran.

2.	Taranggana Gani Putra (Skripsi, 2015)	Studi Deskriptif Tentang Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Ukm Manik – Manik Kaca Di Kabupaten Jombang	Menggambarkan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM manik – manik kaca dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan manik – manik kaca	Deskriptif Kualitatif	Peran pemerintah daerah dalam pertumbuhan UMKM manik kaca di Kabupaten Jombang yakni menjadi penyedia, artinya pemerintah mempunyai tugas memfasilitasi UMKM guna menggapai visi dalam pengembangan usaha yang dimiliki oleh tiap UMKM. Pemerintah Kabupaten Jombang juga berperan menjadi katalisator, artinya pemerintah memiliki tugas guna mempercepat prosedur berkembangnya UMKM, misalnya yaitu menyematkan karya terbaik Kabupaten Jombang antara lain kerajinan manik - manik kaca. ataupun menyelenggarakan Jombang Expo sebagai acara tahunan yang berfungsi menjadi ajang memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat luas.
----	---	--	---	--------------------------	--

3.	Feni Dwi Anggraeni (Jurnal Administrasi Publik, 2013)	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)		Deskriptif Kualitatif	Riset yang dilakukan Feni yaitu mengambil contoh kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasar pada data Dinas Koperasi dan UMK Kota Malang, terdapat sebanyak 14 unit pengusaha emping jagung, yang mana masih terdapat berbagai kendala yang mereka alami saat pengembangan usahanya. Guna mengatasi hal tersebut harus dilakukan strategi pengembangan usaha mikro melalui dua sektor, yaitu internal yang dilakukan oleh masing – masing pelaku usaha maupun sektor eksternal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Koperasi dan UMK.
4.	Alyas dan Muhammad Rakib (Jurnal	Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan	Mengetahui strategi pengembangan UMKM dalam	Deskriptif Kualitatif	Usaha roti maros di Kabupaten Maris memiliki kelemahan, kekuatan, peluang serta ancaman.

	Sosiohumaniora, 2017)	Menengah dalam Penguatan Perekonomian Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)	penguatan ekonomi kerakyatan pada usaha roti di Kabupaten Maros		Strategi dalam pengembangan usaha roti maros dilakukan sesuai dengan hasil analisis SWOT. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan tersebut terdiri dari kekuatan seperti: (1) kenyamanan tempat dan lokasi yang strategis, (2) ketersediaan bahan baku, (3) harga yang cukup terjangkau, (4) varian rasa dari roti maros, (5) keakraban dan komunikasi yang terjalin antar karyawan cukup baik, (6) aneka macam produk pendamping yang ditawarkan, adapun yang menjadi kelemahan seperti: (1) SDM yang terbatas, (2) Modal yang terbatas, (3) Pemasaran yang belum intensif, (4) Keterbatasan alat produksi pendukung, (5) Lemahnya sistem manajemen usaha. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan tersebut
--	-----------------------	---	---	--	---

					terdiri dari peluang seperti: (1) perkembangan TIK, (2) Dukungan dari pemerintah, (3) loyalitas dan hubungan baik pelanggan, (4) perluasan usaha.
5.	Roby Firmansyah, Ratih Nur Pratiwi, dan Riyanto (Jurnal Administrasi Publik, 2014)	Strategi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)	Mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pemberdayaan UMKM khususnya di sentra industri brem kabupaten madiun	Deskriptif Kualitatif	Diskoperindagpar Kabupaten Madiun telah mengambil langkah-langkah pemberdayaan UMKM di Sentra Brem Desa Kaliabu, antara lain: 1) Strategi peningkatan kapasitas keuangan, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan SDM, dan 4) Strategi Regulasi dan Pengendalian. Faktor pendorong dalam pemberdayaan UMKM tersebut yaitu: 1) brem sebagai produk yang berkualitas; 2) bantuan dari pihak terkait. Hambatannya adalah: 1) Mengalami masalah keuangan, dan 2) Kurangnya manajemen.

6.	Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2019)	Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan UKM)	Mengetahui peran Pemerintah Dearah dalam pemberdayaan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Minahasa.	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mewujudkan iklim yang baik bagi UMKM dalam hal strategi dan penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak kepada UMKM, menyebabkan UMKM terhambat dalam pemasaran produk, dan kendala keuangan yang terus membatasi pengambilan keputusan di tingkat daerah, sehingga pemerintah daerah belum mampu menyediakan modal dan alat – alat yang dapat digunakan oleh UMKM.
----	---	---	---	-----------------------	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber E-Journal

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pedoman penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feni Dwi Anggraeni yang mana topik yang dibahas dalam penelitian tersebut mengenai pengembangan UMKM dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)” dimana dalam penelitian tersebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

turut membantu mengatasi tantangan dalam mengembangkan UMKM seperti produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Pengembangan UMKM terjadi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dilakukan oleh pengusaha UMKM tersebut dengan cara melakukan pengadaan modal, inovasi produk, pelebaran jaringan pemasaran, dan pengadaan sarana dan prasarana produksi. Sedangkan secara eksternal sendiri dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang kepada UMKM berupa pemberian akses keuangan, pembinaan dan pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran produk, serta penyediaan sarana dan prasarana. Dalam penelitian Feni Dwi Anggraeni terdapat beberapa kendala dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yaitu seperti kenaikan harga bahan baku, keterbatasan sumber daya manusia, masalah keuangan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.

Sehingga penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki persamaan dengan penelitian Feni Dwi Anggraeni, dilihat dari regulasi yang digunakan. Namun, terdapat perbedaan fokus dan lokus penelitian. Dimana penelitian yang peneliti susun memiliki fokus dan lokus pada strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

1.6.2. Administrasi Publik

Menurut etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) dan bermula dari kata “*ad*” dan “*ministrae*” artinya “pelayanan”, dan dalam bahasa Indonesia

berarti pelayanan dan / atau kepuasan. Menurut Tracker (2008: 2) yang dikutip oleh Keban, administrasi didefinisikan sebagai proses yang dinamis dan berkesinambungan, didorong oleh koordinasi dan kerjasama untuk menggunakan orang dan material guna meraih visi. Berdasarkan Pasolong (2011: 3), pekerjaan perencanaan diterapkan sekelompok individu guna meraih visi secara efisien, efektif serta wajar disebut administrasi. Sedangkan publik sendiri diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu, namun “publik” juga merujuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau disebut dengan lembaga pemerintah.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (1988:29-30), adalah proses mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya publik atau individu untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan publik. Administrasi publik adalah seni dan sains yang dirancang guna mengatur urusan publik serta melakukan bermacam - macam tugas yang diberikan. Tujuan manajemen publik yaitu menyelesaikan permasalahan sosial dengan penyempurnaan maupun memperbaiki, khususnya segi organisasi, keuangan, dan SDM. L.F. Keller (2003: 997) menganggap administrasi publik sebagai sistem manajemen administrasi publik yang kompleks. Administrasi publik dianggap sebagai pengelolaan perkembangan teknologi modern menuju pemerintahan modern.

Menurut Nigro & Nigro, administrasi publik adalah upaya kolaborasi kelompok dalam pengaturan publik yang terdiri dari ketiga departemen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Nicholas Henry, administrasi publik adalah perpaduan kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran akan fungsi pemerintah dalam masyarakat dan mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut penjelasan Waldo dalam Pasolong (2008:2), adalah pengelolaan dan pengorganisasian personel beserta perlengkapannya untuk memenuhi tujuan pemerintah. Nicholas Henry mengungkapkan ada beberapa perubahan paradigma administrasi negara :

1. Paradigma ke – I (Dikotomi Politik dan Administrasi, Tahun 1900 – 1926)

Paradigma ke – I dicirikan oleh Leonard D. White dan Frank J. Goodnews, yang menunjukkan bahwa politik wajib fokus pada kinerja kemauan rakyat atau kebijakan, dan pemerintah harus memperhatikan ini, Kebijakan atau kemauan. Pemisahan politik dan administrasi terwujud antara lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas pengungkapan kehendak rakyat dan badan pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan kehendak rakyat. Dalam hal ini, fungsi lembaga peradilan adalah membantu lembaga legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Paradigma ini hanya menekankan pada lokus yaitu birokrasi pemerintahan, tetapi tidak secara jelas membahas secara rinci poin-poin kunci atau metode yang harus dikembangkan dalam administrasi publik

2. Paradigma Ke - II (Prinsip Administratif, 1927-1937)

Willoughby, Gullick, dan Urwick merupakan tokoh yang mengusulkan paradigma ini untuk menjadikan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus

administrasi publik. Prinsip ini biasa disebut dengan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting). Tidak ada lokus yang jelas dari administrasi publik pada paradigma ini.

3. Paradigma Ke – III (Administrasi Publik selaku Ilmu Politik, 1950 hingga 1970)

Administrasi publik adalah ilmu politik, dan kedudukannya adalah birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya kabur, karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Saat itu manajemen publik mengalami krisis identitas, karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin ilmu yang sangat dominan di bidang administrasi publik.

4. Paradigma Ke – IV (Administrasi Publik selaku Ilmu Administrasi)

Dalam paradigma ini membahas tentang dasar – dasar manajemen yang dulunya umum, dan kini berkembang secara objektif seta mendalam. Paradigma tersebut memiliki dua orientasi perkembangan, yaitu arah pengembangan pengetahuan administrasi asli yang dijunjung oleh disiplin ilmu psikologi sosial, dan arah yang berpandangan kebijakan publik. Karena diasumsikan bahwa kunci pada pengembangan paradigma ini mampu diimplementasikan pada bidang administrasi publik juga swasta, maka lokus paradigma tersebut menjadi tidak jelas.

5. Paradigma Ke – V (Administrasi Negara adalah Administrasi Publik, Sejak Tahun 1970 hingga saat ini)

Paradigma ini sudah jelas lokus dan fokusnya. Pada paradigma ini yang menjadi fokus administrasi publik yaitu teori manajemen, teori kebijakan publik, dan teori organisasi. Lokusnya yaitu pada kepentingan publik dan masalah publik.

6. *Old Public Administration (OPA)*

Fokus utama dari OPA yaitu mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang berhubungan dengan pekerjaan.

7. *New Public Administration (NPA)*

Ada NPA selain mengutamakan efisiensi dan efektivitas juga menerapkan keadilan sosial dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai pelaksana administrasi publik. Oleh karena itu pendekatan pada NPA adalah sosiologis dan psikologis.

8. *New Public Management (NPM)*

Dalam perkembangannya, NPM menuai banyak kritik karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum.

9. *New Public Service (NPS)*

Fokus pada paradigma NPS mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

10. *Good Governance*

LAN dalam Maksudi (2017:336) menjelaskan bahwa *good governance* memiliki dua makna yaitu pertama, berbagai aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak yang mampu meningkatkan kapabilitas rakyat dalam mencapai tujuan nasional, pembangunan berkelanjutan, kemandirian serta keadilan sosial. UNDP dalam Maksudi (2017 :337) menjelaskan ada 9 prinsip dalam *good governance*, yaitu : (1) Transparansi, (2) Partisipasi, (3) Daya Tanggap, (4) Penegakan hukum, (5) Keadilan, (6) Orientasi Konsensus, (7) Efisiensi dan Efektifitas, (8) Visi Strategis, dan (9) Tanggung jawab.

1.6.4. Manajemen Publik

Overman (dalam Keban, 2004:85) mengartikan bahwa manajemen publik sebagai kajian interdisipliner terhadap berbagai aspek umum organisasi, yang merupakan kombinasi antara SDM, material, keuangan, politik maupun informasi serta perspektif lainnya terhadap gabungan dari fungsi pengelolaan. Menurut Mahmudi (2010: 38-40), mengungkapkan manajemen publik memiliki setidaknya tujuh karakteristik yang berbeda dengan manajemen swasta, yaitu :

1. Keputusan sektor publik didasarkan pada pilihan kolektif dalam pemerintahan bukan pilihan individu di pasar. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan dikomunikasikan dengan Partai Politik dan DPR.

2. Menyediakan sumber daya merupakan alasan utama sektor publik, karena penggerak sektor publik karena kebutuhan akan air bersih, kesehatan, transportasi, listrik, keselamatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya.
3. Sektor swasta lebih tertutup dibandingkan dengan sektor publik, karena informasi wajib disediakan untuk publik secara luas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik.
4. Menciptakan kesempatan yang adil bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan utamanya, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas lainnya merupakan ketertarikan bagi organisasi publik.
5. Sektor swasta tidak dihadapkan oleh masalah pemerataan kesejahteraan sosial, sedangkan sektor publik bertanggungjawab atas pelaksanaan itu.
6. Masyarakat merupakan kekuasaan tertinggi dalam sektor publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat menjadi pelanggan, namun dalam beberapa kasus masyarakat tidak menjadi pelanggan.
7. Pasar merupakan persaingan pada sektor swasta, sedangkan aksi kolektif merupakan alat pemerintah pada sektor publik. Mewujudkan kepuasan dan keinginan semua orang sangat sulit diterapkan oleh pemerintah, tetapi aspirasi kolektif dapat terwujud.

1.6.5. Manajemen Strategi

Secara etimologi, asal mula manajemen yaitu dari kata *management* (dalam bahasa Perancis) dan mempunyai arti seni mengatur ataupun melaksanakan. Istilah manajemen bermula dari kata *management* (bahasa Inggris), turunan dari kata “to

manage” yang bermakna mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Jadi, manajemen dapat dipandang sebagai bagaimana mengatur, mengarahkan, dan memimpin semua sumber daya manusia agar usaha yang dikerjakan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Ismail Solihin (2012), istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari “*stratus*” yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti memimpin. Nanang Fatah menjelaskan bahwa strategi merupakan langkah sistematis dalam menyusun perencanaan jangka panjang dan menyeluruh dalam pencapaian suatu tujuan. Jauch dan Gluech dalam Agustina (1998:12) mendefinisikan strategi merupakan agenda yang terpadu, komprehensif maupun terintegrasi dengan menghubungkan kelebihan strategi organisasi beserta tantangannya, serta bertujuan memastikan bahwa visi organisasi mampu diraih melalui implementasi organisasi yang akurat.

Menurut ahli manajemen strategis sektor publik, Alan W. Steiss, kondisi yang dihadapi organisasi memicu lahirnya manajemen strategis yang perhatian utamanya adalah bagaimana cara menghadapi lingkungan eksternal sekaligus meningkatkan kemampuan internal organisasi (Steiss dalam Suaedi, 2003:1). Lingkungan yang kompetitif membuat organisasi tergerak dalam menerapkan manajemen strategis untuk meningkatkan kemampuan organisasinya (*ability*) dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang berubah dengan cepat.

“Keinginan untuk bertahan dalam lingkungan kompetitif, membuat banyak organisasi beralih untuk menggunakan manajemen strategis dan berencana untuk meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan – perubahan dalam lingkungan yang bertransformasi dengan cepat, serta meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi dan memuaskan harapan pelanggan.”
(*ILembe dan Were, 2014*)

Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger dalam Novianto (2003) mengartikan manajemen strategis ialah ketetapan maupun aktivitas manajemen guna performa organisasi berkepanjangan. Berdasarkan pengertian Wheelen dan Hunger bahwa pada manajemen strategis, ketetapan maupun aktivitas meliputi beberapa pilihan, tujuan dari ketetapan serta aktivitas itu guna kinerja organisasi berkepanjangan.

Manajemen strategis selaku seni merencanakan, mengimplementasikan maupun menguji ketetapan organisasi guna meraih visi yang diinginkan (Fred R. David, 2004). Seni yang dimaksud sebelumnya menampilkan terdapatnya prosedur manajemen strategis. Seni juga menampilkan jika prosedur tersebut membutuhkan kemampuan ataupun metode khusus dalam merencanakan, mengimplementasikan serta mengevaluasi ketetapan organisasi guna menggapai visi yang diinginkan.

Sedangkan, Fahmi (2014) mendefinisikan manajemen strategis merupakan rancangan yang dirangkai serta diatur selepas memperkirakan beberapa segi guna menggapai visi organisasi.

Kemudian, Ketchen Jr. (2009) menjelaskan bahwa manajemen strategis selaku keputusan, analisis maupun aksi yang dilaksanakan organisasi guna menggapai serta menegakkan keunggulan bersaing.

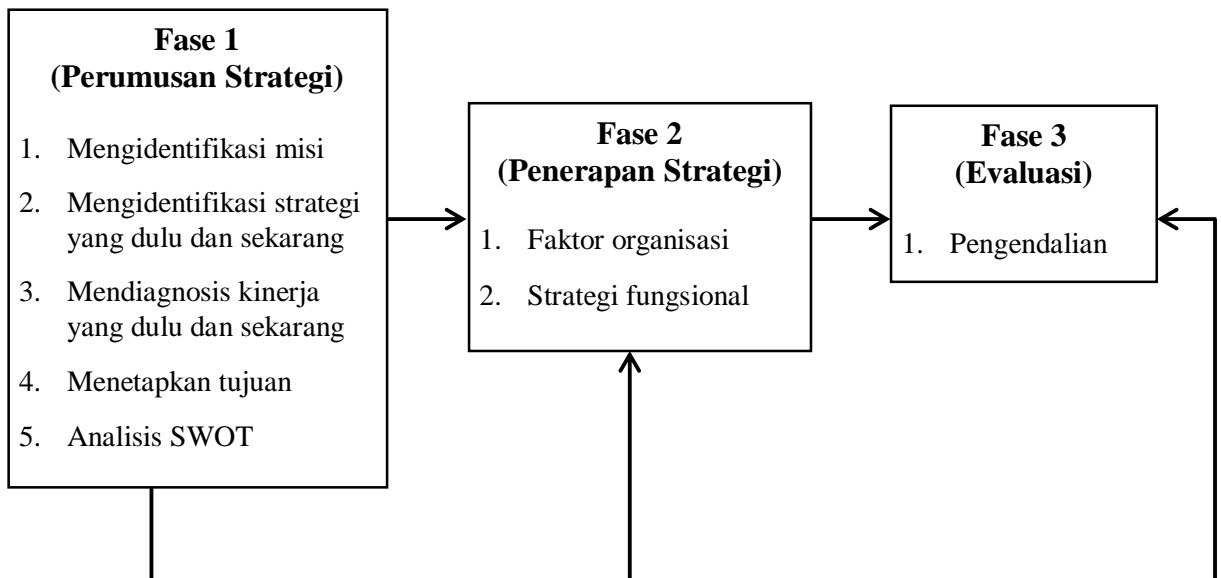
Setelah itu, Sondang P. Siagian (2016) mengemukakan manajemen strategis selaku serangkaian tindakan serta aksi yang diciptakan pemimpin organisasi guna diwajibkan kepada segala sumber daya organisasi untuk emnggapai visi yang

ditentukan. Beberapa aksi dan ketetapan dirancang mencermati kondisi internal maupun eksternal organisasi.

Manajemen strategis terdiri atas beberapa tahapan. Bersumber pada buku karangan Riva'i (2004), ada suatu bagan yang menampilkan prosedur manajemen strategi yang secara universal mampu dibagi kedalam tiga metode yaitu : :

- a. Perumusan strategi (*Formulation strategy*)
- b. Penerapan Strategi (*Implementasi strategy*)
- c. Penilaian (*Evaluating*)

Agar lebih mudah dipahami maka digambarkan melalui matriks berikut :



Gambar 1. Proses Manajemen Strategi (Riva'I, 2004)

Berdasar pada gambar diatas, ada tiga tahap dalam manajemen strategi: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Pada tahap pertama yaitu perumusan strategi, organisasi dituntut untuk meningkatkan visi dan misinya dengan melihat kemungkinan dan risiko dari luar organisasi; mengidentifikasi

kelebihan dan kekurangan organisasi; menetapkan tujuan jangka panjang; dan merencanakan strategi alternatif untuk diterapkan.

Proses dari manajemen strategi menurut Fred David dalam Suaedi (1993: 5-6) terdiri dari beberapa tahap :

a. Perencanaan Strategi

Perumusan pertanyaan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, penciptaan tujuan jangka panjang, perumusan berbagai strategi.

b. Menerapkan Strategi

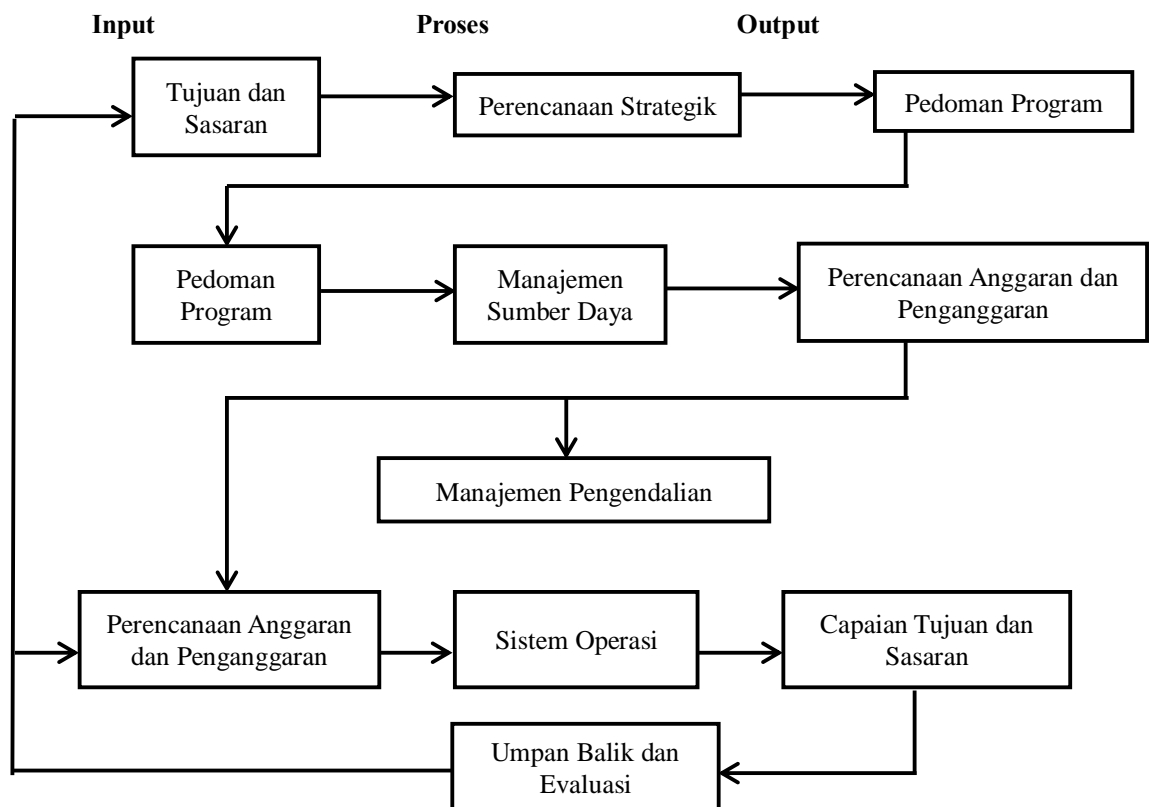
Agar berhasil menerapkan strategi, tujuan program harus ditetapkan, kebijakan harus direncanakan, pegawai harus dimotivasi, dan sumber pendanaan harus dialokasikan. Selain itu, budaya organisasi harus mendukung pelaksanaan strategi, struktur organisasinya harus efisien, anggarannya harus disiapkan, dan sistem manajemen informasinya harus dikembangkan.

c. Menilai Strategi

Untuk mengevaluasi keefektifan program dan menerapkan tindakan korektif atau perbaikan, tinjau elemen internal dan eksternal yang berfungsi sebagai dasar dari strategi saat ini. Untuk meminimalkan kesulitan yang mungkin timbul selama implementasi strategi, penting untuk mengidentifikasinya. Namun, jika strategi yang dipilih gagal, diperlukan penyesuaian strategi

organisasi dengan menggabungkan banyak strategi atau memilih strategi lainnya.

Alan W. Steiss dalam Suaedi (2003) menggambarkan sebuah proses manajemen strategi yang lebih kompleks. Tujuan dan sasaran digambarkan sebagai input, perencanaan strategis sebagai proses, dan pedoman atau panduan program menjadi output-nya. Setelah itu, pedoman program akan menjadi input bagi proses manajemen sumber daya. Hasil keluarannya adalah perencanaan finansial dan penganggaran. Keluaran tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi proses pelaksanaan sistem dengan control manajemen sebagai pengendali, sedangkan keluarannya adalah tujuan dan sasaran yang telah tercapai. Kemudian dilakukan umpan balik dan evaluasi dari keseluruhan proses manajemen strategis tersebut.



Gambar 2. Proses Manajmen Strategi (diadaptasi dari Steiss, 2003: 9)

Berdasarkan uraian beberapa ahli sebelumnya, diambil kesimpulan mengenai manajemen strategis yaitu prosedur perancangan pengambilan keputusan guna menggapai visi organisasi dengan memperhatikan kondisi eksternal maupun internal organisasi.

1.6.6. Perencanaan Strategi

Menetapkan tujuan atau sasaran organisasi dan membuat rencana menyeluruh untuk mencapainya adalah langkah-langkah dalam proses perencanaan. Tujuan perencanaan adalah memberikan arahan, mengurangi dampak perubahan, mengurangi pemborosan, dan menetapkan standar pengendalian (Robbins dan Coulter, 1999). Menurut Steiss (2003), strategi adalah menjalankan rencana yang benar (*doing the right things*), bukan sekedar melaksanakan rencana dengan benar (*doing the things right*).

Perencanaan strategis menurut Bryson dalam Nugroho adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan membuat pilihan - pilihan mendasar dan kegiatan – kegiatan yang membentuk dan mengarahkan organisasi untuk memahami apa itu (*what an organization is*), apa yang dilakukannya (*what it does*), dan berapa banyak organisasi yangterlibat (*why it does it*). Bryson (2007:55) lebih lanjut menambahkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan strategis yang dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara strategis. Berikut langkah – langkah perencanaan strategi :

a. Menyepakati proses perencanaan strategi

Dalam kesuksesan perencanaan strategis dibutuhkan dorongan serta komitmen. Negosiasi dengan pengambil keputusan internal dan eksternal tentang upaya dan langkah – langkah krusial dalam perencanaan strategi merupakan langkah awal yang diambil dalam perencanaan strategi.

b. Menentukan mandat organisasi

c. Memperjelas visi dan misi organisasi

Bagi organisasi pemerintah, perusahaan maupun organisasi nirlaba harus mengidentifikasi mengenai apa yang harus dilakukan dan mengapa ini dilakukan.

d. Menilai lingkungan eksternal (ancaman dan peluang)

Mengidentifikasi ancaman dan peluang yang dihadapi organisasi di lingkungan luar organisasi.

e. Menilai lingkungan internal (kelemahan dan kekuatan)

Langkah selanjutnya yaitu memantau keadaan internal organisasi seperti kondisi sumber daya (input), strategi yang digunakan saat ini (proses), dan Kinerja (output).

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Isu strategis adalah masalah yang jika diabaikan akan berdampak negatif terhadap visi dan misi organisasi. Dalam menyatakan isu strategis tepat

beberapa syarat seperti diungkapkan secara ringkas dalam satu baris, menyoroti penyebab masalah dan menguraikan akibatnya jika masalah tidak dapat diselesaikan.

g. Merancang strategi

Mengelola isu dengan merumuskan strategi. Merancang suatu strategi diperlukan dalam organisasi untuk memecahkan permasalahan.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Selain itu, penulis mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh Bryson di atas saat menyusun perencanaan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Penelitian perencanaan strategi ini menggunakan tiga langkah penting karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah memiliki visi, misi, dan manat atau amanat :

1. Analisis lingkungan strategis, baik lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis menggunakan analisis SWOT.
3. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.

1.6.6.1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis strategis lingkungan bertujuan untuk menentukan pengaruh utama dan memilih strategi yang tepat sesuai dengan tantangan lingkungan. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Lingkungan Internal

Analisis internal organisasi untuk mengidentifikasi atau menilai kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri. Kelemahan adalah kondisi atau hal yang menjadi kelemahan dalam tubuh organisasi, sementara kekuatan adalah kondisi yang menjadi kekuatan dalam organisasi. Wheelen dan Hunger (2000, dalam Riyanto 2018) menjelaskan bahwa komponen pembentuk lingkungan internal yaitu salah satunya sumber daya. Hal tersebut dapat dilihat melalui sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non – manusia. Ketersediaan SDM dapat diukur dengan jumlah SDM yang ada dan kemampuan atau kapabilitas SDM, sedangkan sumber daya non-manusia dapat diukur dengan ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Lingkungan Eksternal

Dua faktor strategis pada lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman. Peluang adalah lingkungan eksternal yang menguntungkan organisasi dan bahkan dapat menjadi senjata untuk mendorongnya maju, sedangkan ancaman adalah faktor luar yang dapat mengganggu kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efektif. Analisis organisasi secara eksternal dalam rangka mengidentifikasi atau menilai peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Adapun faktor-faktor eksternal antara lain yaitu :

1. Ekonomi

Hampir tidak ada organisasi yang luput dari pengaruh kondisi-kondisi ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam sektor ekonomi

in informasi yang diperlukan adalah yang berhubungan dengan tingkat pengangguran, gaji dan upah, tingkat pendapatan masyarakat, dan tidak ketinggalan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemasaran produk dari organisasi publik dan non-profit. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian. Pola konsumsi dipengaruhi oleh kemakmuran relatif dari berbagai segmen pasar, maka setiap organisasi harus mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang mempengaruhi organisasinya.

2. Sosial dan Budaya

Faktor sosial yang mempengaruhi suatu organisasi meliputi kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat dalam lingkungan eksternal organisasi, yang berkembang dari kondisi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan dan etnis. Dari sudut sosial yang sering kali perlu diperhatikan yaitu gaya hidup masyarakat. Pada kondisi budaya yang patut diperhatikan ialah nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, sikap, dan kebiasaan sosial. Oleh sebab itu, pengaruhnya bagi proses pengambilan keputusan berdampak sangat luas.

3. Teknologi

Teknologi merupakan elemen lingkungan yang paling banyak berpengaruh terhadap ketidakseimbangan organisasi. Untuk meningkatkan inovasi, suatu organisasi harus menyadari perubahan

teknologi yang mungkin mempengaruhi organisasi tersebut. Semua organisasi terutama UMKM yang bertumbuh cepat, harus memahami kemajuan teknologi saat ini dan kemungkinan kemajuan di masa depan yang dapat mempengaruhi produk dan jasanya.

4. Politik atau Hukum

Arah dan stabilitas faktor politik merupakan pertimbangan utama dari organisasi dalam merumuskan strategi. Faktor politik menentukan parameter – parameter hukum dan aturan di mana organisasi harus berjalan. Dalam bidang politik dan hukum, perlu diketahui tentang berbagai perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup organisasi, serta stabilitas politik dan pemerintahan. Kegoncangan dan krisis politik dan pemerintahan biasanya menghambat pencapaian sasaran organisasi.

1.6.6.2. Evaluasi Isu Strategis

Isu-isu strategis ialah konflik antara berbagai kekuatan atau konflik antara nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan (Salusu, 2005: 492). SWOT merupakan singkatan dari Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menurut Muhammad (2008), analisis SWOT merupakan proses melakukan penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya yang dilakukan oleh manajemen sendiri.

Sementara itu, Rangkuti (2013) menyimpulkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika dan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis atau memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Matrik SWOT menghasilkan empat tipe strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal.
3. Strategi ST menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal.
4. Strategi WT merupakan strategi yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	Tentukan faktor – faktor kekuatan internal	Tentukan faktor – faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Tentukan faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Tentukan faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 1.2 Matrik SWOT (Rangkuti, 2013)

1.6.6.3. Evaluasi Isu Strategis

Uji litmus digunakan untuk menyaring sejumlah isu strategis. Isu yang memiliki skor tertinggi adalah isu yang paling strategis, sementara isu operasional adalah isu yang memiliki skor terendah dalam seluruh dimensi. Uji litmus digunakan untuk mengembangkan beberapa ukuran mengenai tingkat kestrategisan suatu isu.

Berikut adalah penilaian skor :

- 1) Isu yang bersifat operasional = 1
- 2) Isu yang bersifat moderat = 2
- 3) Isu yang bersifat strategis = 3

Tabel 1.6
Uji Litmus

No.	Pertanyaan	Nilai		
		1	2	3
1.	Kapan tantangan peluang adalah strategi yang ada dihadapan anda?	Sekarang	Tahun Depan	Dua Tahun atau lebih
2.	Tanggapan luas suatu masalah akan berpegaruh pada departemen anda?	Satuan/divisi tunggal	Beberapa divisi	Seluruh departemen
3.	Keputusan banyak resiko/peluang organisasi keuangan anda?	Kecil (10% dari anggaran)	Sedang (10% - 25% dari anggaran)	Besar lebih dari 25% dari anggaran
4.	Aapakah strategi bagi pemecahan masalah membutuhkan : A. Mengembangkan sasaran dan program pelayanan baru? B. Perubahan signifikan dalam sumber – sumber atau jumlah pajak? C. Perubahan signifikan dalam ketetapan/perubahan? D. Penambahan atau modifikasi fasilitas? E. Penambahan staf yang signifikan?	Tidak Tidak Tidak		Ya Ya Ya
5.	Bagaimana cara terbaik untuk memecahkan masalah?	Jelas, siap di implementasikan	Parameter luas, agak terperinci	Terbuka luas
6.	Tingkat manajemen manakah yang dapat menetapkan bagaimana mengelola masalah?	Lini Staf Pengawas	Divisi Kepala	Kepala Departemen

7.	Konsekuensi apakah yang mungkin terjadi bila masalah tidak diselesaikan?	Ada gangguan, tidak efisien	Kekacauan pelayanan kehilangan sumber dana	Kekacauan pelayanan biaya besar penghasilan turun
8.	Banyak departemen lain yang dipengaruhi oleh masalah ini dan harus disertakan dalam pemecahannya?	Tidak ada	Satu sampai tiga	Empat atau lebih
9.	Bagaimana kepekaan isu ini terhadap nilai sosial, politik, religious, dan kultural?	Lunak	Sedang	Keras

Sumber : Bryson (2016: 184-185)

Kemudian skor tersebut dijumlahkan sesuai dengan jumlah pertanyaan pada tabel uji litmus, maka jumlah skor yang dihasilkan akan membentuk interval sebagai berikut :

- 1) Isu bersifat operasional jika skornya 13 – 21

Isu bersifat operasional berarti isu tersebut tidak harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan karena dampaknya yang kurang signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

- 2) Isu bersifat moderat jika skornya 22 – 30

Isu bersifat moderat dilaksanakan setelah isu yang sangat strategis terlaksana karena dampaknya yang cukup signifikan bagi masyarakat yang akan datang.

- 3) Isu bersifat strategis jika skornya 31 – 39

Isu bersifat strategis berarti isu tersebut harus menjadi prioritas dan perhatian utama dalam pengambilan kebijakan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

1.6.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut World Bank, UKM merupakan usaha dengan jumlah tenaga kerja sekitar kurang lebih 30 orang dengan penghasilan tahunan sebesar US 3 juta dollar dan jumlah aset tidak melebihi US 3 juta dollar. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil, termasuk Usaha Mikro adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Sementara Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, bahwa usaha kecil yaitu entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 hingga 19 orang, sedangkan usaha menengah yaitu entitas usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 hingga 99 orang. Menurut Tambun (2012) menjelaskan bahwa UMKM ialah unit usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. Rudjianto (2015) menyebutkan bahwa UMKM ialah usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia karena dengan adanya UMKM akan terbentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Sedangkan Ina Primiana (2009) menjelaskan bahwa UMKM ialah suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia.

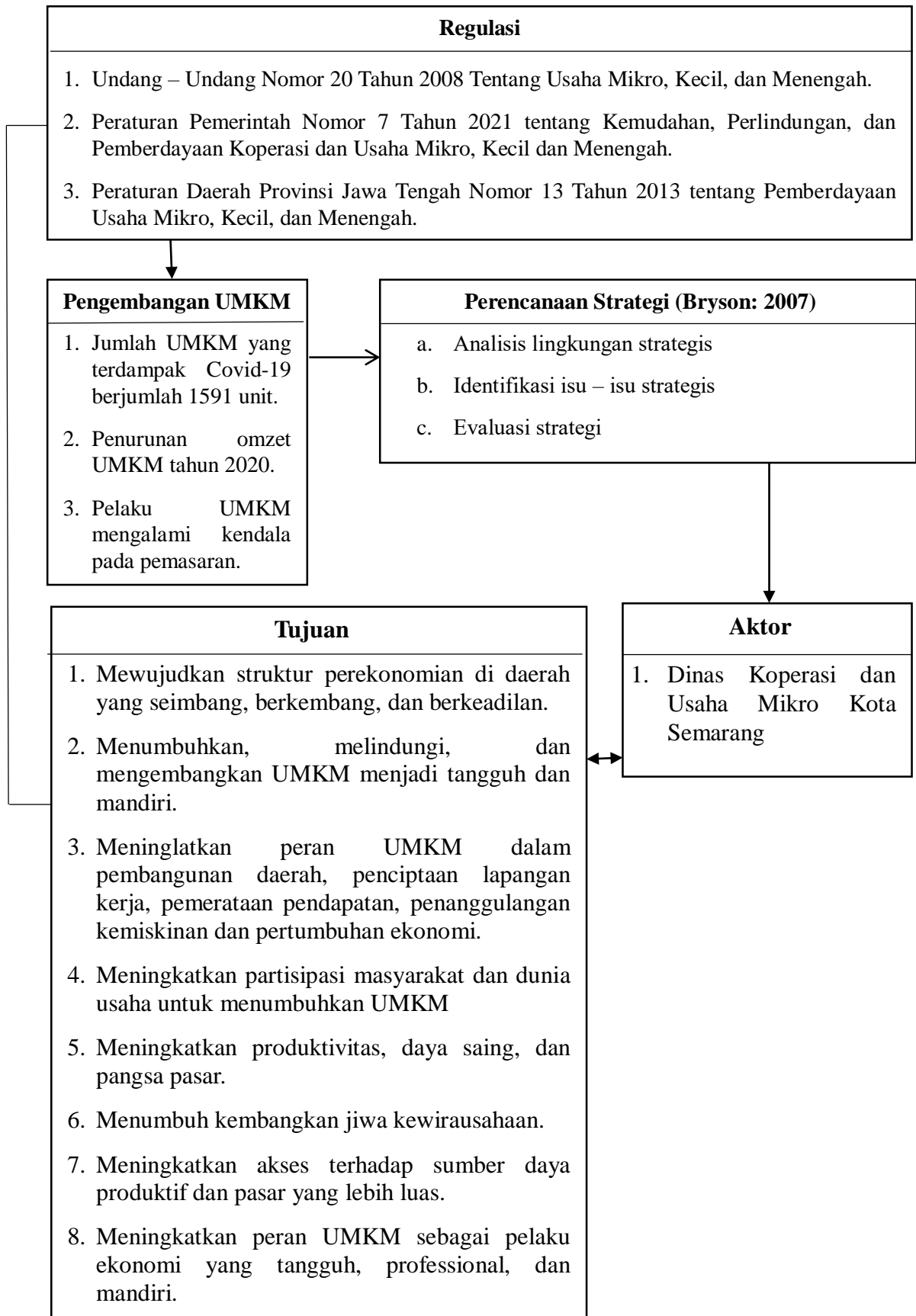
Sesuai dengan regulasi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diartikan :

1. Usaha Mikro merupakan usaha komersial yang dimiliki perseorangan yang mencukupi standar usaha mikro.
2. Usaha Kecil merupakan bentuk bisnis mandiri oleh individu maupun badan usaha bukan anak maupun cabang perusahaan yang dikendalikan atau secara tidak langsung maupun langsung bagian dari usaha besar serta menengah yang mencukupi persyaratan usaha kecil.
3. Usaha Menengah yaitu bentuk usaha mengacu pada usaha ekonomi produktif mandiri oleh individu maupun badan usaha (bukan cabang maupun anak perusahaan) yang secara tidak langsung maupun langsung dimiliki oleh perusahaan besar ataupun kecil yang total aset bersih maupun omzetnya pertahun.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka kriteria UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro yaitu :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk bangunan maupun tanah tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.
2. Kriteria Usaha Kecil yaitu :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk bangunan maupun tanah tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
3. Kriteria Usaha Menengah yaitu :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk bangunan maupun tanah tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Fenomena Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan yaitu tentang strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Penelitian akan terfokus pada deskripsi dari masing – masing konsep :

1. Perencanaan strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Ada beberapa tahapan perencanaan strategis yaitu :
 - a. Analisis Lingkungan Strategis (Internal dan Eksternal) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Analisis lingkungan strategis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Menilai lingkungan eksternal merupakan tindakan menelusuri lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa lingkungan eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui ancaman dan peluang dalam perencanaan strategi pengembangan UMKM di Kota Semarang. Langkah selanjutnya yaitu menilai keadaan internal atau tindakan untuk mengenali kelemahan dan kekuatan yang ada pada internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti kondisi sumber daya. Kaitannya dengan tahap sebelumnya yaitu bahwa kekuatan dan kelemahan yang sudah diidentifikasi nantinya digunakan untuk mengendalikan ancaman dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang dalam perencanaan strategi pengembangan UMKM di Kota Semarang.

b. Identifikasi Isu – isu Strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam Pengembangan UMKM

Mengidentifikasi isu strategis merupakan tahap paling penting pada perencanaan strategi guna mengetahui permasalahan kritis yang sesungguhnya dihadapi oleh organisasi. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi apa yang menjadi isu strategis yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Kota Semarang. Tahap ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang akan dilakukan oleh organisasi. Oleh sebab itu, perlu melakukan identifikasi isu strategis agar mengetahui isu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam perencanaan strategi pembangunan UMKM.

c. Merumuskan Strategi Pengembangan UMKM di Kota Semarang

Setelah mengelola isu, langkah yang harus dilakukan yaitu merumuskan strategi. Merancang suatu strategi diperlukan dalam organisasi untuk memecahkan permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang guna pengembangan UMKM. Tujuan perumusan strategi ini yaitu untuk menciptakan strategi yang efektif dalam mengatasi isu – isu yang ada. Tentunya pada tahap perumusan

strategi ini dilakukan tidak luput dengan melihat faktor internal dan eksternal organisasi dalam hal ini yaitu yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Berikut merupakan matriks fenomena penelitian “Strategi Pengembangan UMKM Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang” :

No.	Fenomena	Gejala yang diamati	Item
Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang			
1.	Analisis Lingkungan Strategis	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Proses menganalisis lingkungan eksternal berupa ancaman dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang dalam perencanaan strategi pengembangan UMKM. • Proses menganalisis lingkungan internal berupa kekuatan dan tantangan yang ada pada internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang dalam

			perencanaan strategi pengembangan UMKM.
2.	Identifikasi Isu – isu Strategis	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Proses mengidentifikasi hambatan atau permasalahan kritis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang dalam perencanaan strategi pengembangan UMKM.
3.	Mengevaluasi Strategi	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Proses evaluasi strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang guna untuk menentukan strategi yang paling strategis untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh UMKM terdampak pandemi

			Covid-19 di Kota Semarang.
--	--	--	----------------------------

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis. Metode penelitian dalam Sugiyono (2014:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal atau sesuai dengan logika manusia, sehingga dapat ditelaah dan terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis atau langkah-langkah tersebut sesuai dengan alur penelitian sehingga dapat dipahami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulann dengan triangulasi, analisis

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1.9.1. Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bagdon dan Taylor (dalam Moleong, 2005:4), menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Berikut ada beberapa tipe-tipe penelitian yang terbagi yaitu :

1. Tipe Penelitian Historis

Tipe penelitian historis adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi.

2. Tipe Penelitian Eksploratif

Tipe penelitian eksploratif adalah tipe penelitian yang berusaha untuk menelusuri atau menggali ada tidaknya suatu masalah atau ingin mengetahui secara mendalam akan suatu masalah tertentu. Penelitian tipe ini bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks.

3. Penelitian Deskriptif

Menurut Singarimbun (1989:4), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Menurut Sukmadinata (2009:18), penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

4. Tipe Penelitian Eksplanatori

Tipe penelitian eksplanatori adalah tipe penelitian yang sudah ada hipotesisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya hubungan dan pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya, dalam rangka untuk menguji penelitian yang akan diajukan guna diterima atau ditolak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti mencoba menjelaskan bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan melakukan analisis SWOT, beserta faktor pendorongnya.

1.9.2. Lokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan tempat atau lokasi bagi peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, dan melakukan pengamatan penelitian. Lokus dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang beralamat di Gedung Pandanaran, Lt.7, Jl. Pemuda 175, Kota Semarang. Pemilihan lokus penelitian ini dikarenakan sektor UMKM di Kota Semarang jumlahnya setiap tahun semakin bertambah banyak dan penghasilannya juga cukup besar, namun pada

pandemi Covid-19 ini terjadi beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM. Perlunya campur tangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selaku instansi pemerintah yang memiliki peran salah satunya dalam pengembangan UMKM, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

1.9.3. Subjek Penelitian

Suharsimi Arikunto (2010) mengartikan bahwa subjek penelitian merupakan batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan orang, benda, dan hal untuk melekatnya variabel. Dalam memilih informan digunakan teknik *purposive*, yaitu penetapan informan. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang seperti Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro, Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dilakukan dalam catatan lapangan (transkrip).

Jenis data yang digunakan peneliti sebagai referensi dan patokan dalam melakukan penelitian ini adalah data-data berupa teks mengenai suatu fenomena, hasil studi dokumen, dan hasil wawancara dengan informan.

1.9.5. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009: 225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data didapat dengan menggunakan :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, serta Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Data primer ini berupa antara lain: catatan hasil wawancara, rekaman hasil wawancara, dan data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen dinas berupa renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, hasil-hasil studi, skripsi, dan sebagainya.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009: 224) memaparkan pada pelaksanaan penelitian yang menjadi langkah sangat strategi ialah cara mengumpulkan informasi atau data, sebab penelitian bertujuan mendapatkan informasi nyata. Untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif, maka perlu melakukan observasi, dokumentasi, maupun

wawancara (Sugiyono, 2009: 225). Penelitian ini dalam pengumpulan data memanfaatkan 3 cara pengumpulan data :

a. Observasi

Yaitu prosedur kompleks terdiri dari berbagai prosedur baik secara psikologis maupun biologis (Sugiyono, 2014: 145). Sedangkan definisi observasi menurut Riyanto (2010: 96) yaitu cara mengumpulkan informasi dengan observasi tidak langsung dan langsung. Menurut Riyanto (2010, 98 – 100) terdapat beberapa tipe observasi :

1. Observasi Partisipan

Dapat dikatakan sebagai observasi partisipan apabila observer ikut andil dalam keseharian narasumber.

2. Observasi Non Partisipan

Dapat dikatakan sebagai observasi non partisipan apabila observer tak ikut andil dalam keseharian narasumber.

3. Observasi Sistematis

Pengamat menggunakan panduan sebagai alat observasi.

4. Observasi Non Simpatik

Pengamatan yang dilaksanakan seorang peneliti tanpa memanfaatkan alat observasi.

5. Observasi Eksperimental

Peneliti melakukan pengamatan dengan mengamati dan memasuki situasi khusus.

Dalam penelitian ini menerapkan tipe observasi sistemik dan non partisipan, karena observer tidak ikut andil pada berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh orang yang diamati.

b. Wawancara

Menurut Riyanto (2010: 82) wawancara sama dengan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi tatap muka antara peneliti dan narasumber. Untuk memperoleh informasi perihal bagaimana manajemen strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maka peneliti menetapkan wawancara sebagai salah satu cara mengumpulkan informasi.

c. Dokumentasi

Menurut Riyanto (2012:103), metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen ini dapat diperoleh berdasarkan penelitian terdahulu, laporan dan lain – lain yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan guna penelitian yang akan dilakukan.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. *Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.

c. *Conclusion Drawing/Verivication*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Penelitian ini menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif merupakan teknik analisa yang memberikan informasi mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuan dari analisa deskriptif yaitu hanya menyajikan dan menganalisa data agar bermakna dan komunikatif sesuai dengan data yang dimiliki dan menyampaikan secara bermakna dan komunikatif sehingga menghasilkan informasi yang dapat membuktikan kebenaran kepada khalayak umum.

1.9.8. Kualitas Data

Keabsahan ditempuh melalui prosedur pengumpulan data yang sesuai. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Teknik ini memanfaatkan suatu diluar data guna mengecek maupun membandingkan data. Cara yang ditempuh yaitu :

1. Mengusulkan beragam pertanyaan.
2. Mengecek sumber data yang digunakan.

3. Memaksimalkan metode supaya pemeriksaan kepercayaan data dapat dilaksanakan.

Menurut Patton dalam Moleong (2007: 330 – 332) terdapat berbagai macam teknik triangulasi :

1. Triangulasi Sumber atau Data

Teknik ini mengenakan bermacam sumber data seperti wawancara dengan tidak hanya satu objek yang mempunyai pendapat tidak sama, dokumen, hasil wawancara, arsip, dan observasi.

2. Triangulasi Metode

Upaya yang digunakan dalam teknik ini adalah mengecek atau menguji tingkat reliabilitas maupun validitas data melalui pengecekan dengan menggunakan cara yang sama.

3. Triangulasi Penyidik atau Pengamat

Selain peneliti, ada penyidik atau pengamat yang juga mengecek hasil pendataan.

4. Triangulasi Teori

Untuk meyakinkan mengenai data yang terkumpul memenuhi syarat dengan menggunakan teori lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber atau data, yaitu dengan mengenakan banyak sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, dan

arsip. Harus melakukan perbandingan dan menguji setiap informasi yang didapat untuk mengecek tingkat keyakinan atau data yang didapat dengan alat ukur maupun waktu yang tidak sama.